

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi sebagai esensi dari interaksi antar manusia memegang peranan penting dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Adanya pandangan bahwa komunikasi itu mencakup politik, kiranya dapat dipahami, karena memang politik itu bersifat serba hadir (ubiquitous) dan multimakna. Dalam setiap realitas kehidupan politik dipastikan akan selalu terjadi komunikasi politik.

Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai politik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik. Media-media masa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik. Partai politik menjalankan fungsi sebagai alat mengkomunikasikan pandangan dan prinsip-prinsip partai, program kerja partai, gagasan partai, dan sebagainya.

Komunikasi politik, seperti halnya juga mutlak diperlukan dalam proses pembentukan pemerintahan. Keikutsertaan rakyat dalam proses pemerintahan diwujudkan melalui adanya penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Pemilu adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial antara peserta pemilu (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan aktivitas politik.

Komunikasi politik berperan menyambungkan semua bagian dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan tersebut dikonversikan menjadi

kebijaksanaan. Karena itu komunikasi politik secara keseluruhan tidak dapat dipahami, kecuali apabila dihubungkan dengan dimensi politik dalam segala aspek dan problematikanya. Bila komunikasi berjalan lancar, wajar, dan sehat, sistem politik akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Komunikasi politik berkaitan erat dengan sistem politik yang dianut sebuah .

Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Kesadaran politik masyarakat menjadi faktor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Bentuk partisipasi dapat dilihat juga dari kegiatan sebagai aktivis politik, mencakup antara lain menjadi pimpinan atau anggota partai politik.

Partai Lokal Sira merupakan sebuah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga Indonesia yang berdomisili di Sira secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan setiap anggota, masyarakat Sira, bangsa dan Indonesia. Dalam sistem demokrasi dan ketataan Indonesia partai lokal Sira berperan sebagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi yang diatur dan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Partai politik lokal dianggap lebih mampu untuk memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat Sira. Bisa saja ada partai politik

yang hanya ingin menjadi partai politik lokal saja karena hanya seperti itu kemampuannya. Partai politik lokal tersebut lebih tertarik pada masalah politik ditingkat lokal sehingga hanya berminat mengajukan calon dalam pemilu ditingkat lokal (bahkan mungkin hanya disatu provinsi) konsep partai politik lokal akan dapat menampung aspirasi seperti itu.

Perkembangan partai politik lokal di Sira mengalami pasang surut, hal ini bisa dilihat dari jumlah partai politik lokal saat ini yang ada di Sira yang hanya berjumlah tiga partai saja yaitu Partai Sira (PA), Partai Damai Sira (PDA) dan Partai Nasional Sira (PNA). Sementara pada pemilu tahun 2009 yang lalu, ada enam partai politik lokal di Sira yaitu: Partai Sira Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Sira (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Sira (SIRA), Partai Rakyat Sira (PRA), Partai Sira (PA) dan Partai Bersatu Sira (PBA).

Partai politik lokal di Sira mempunyai tujuan dan fungsi yang hampir sama dengan partai politik nasional pada umumnya. Tujuan umum (mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UndangUndang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sira) dan tujuan khusus (meningkatkan partisipasi politik masyarakat Sira dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan ber sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Sira).

Partai Sira memiliki karakter sebagai Market Oriented Party (MOP). MOP adalah jenis partai yang membuat riset pasar dalam upaya mendesain produk-produk politiknya. Pemetaan yang dilakukan SIRA dalam strategi kampanye maupun diskusi dan kajian mendalam sebelum dan proses panjang memutuskan membuat partai-partai termasuk melihat kekurangan diri secara objektif menjadi indikator bahwa Sira memprioritaskan pasar dalam membangun visi, platform dan tujuan mendirikan partai. Menyerap dan menampung aspirasi yang banyak dari konsulat maupun wilayah tingkat tua sampai ke kampung secara tidak langsung SIRA telah melakukan penyelidikan pasar.

Berdasarkan observasi awal terlihat kurang komunikasi politik DPW Partai Sira Lhokseumawe dengan kader . kurang efektif yang dilakukan. Karena banyak informasi dari DPD tidak disampaikan oleh pengurus dalam administrasi itu di gratiskan kemudian diakhir dalam pendaftaran ternyata apa yang disampaikan ketua tidak sesuai dengan kenyataan diawal yang mengatakan administrasi itu gratis. Nah, disini terlihat jelas bahwa antara Ketua dan Wakil diskomunikasinya tidak satu jalan atau tidak bertentangan. DPW padahal informasi tersebut harus diketahui oleh pengurus pada tingkat DPK dan DPG. Hal ini disampaikan kurangnya diskomunikasi diantara Ketua dan Wakil pengurus pada tingkat DPK dan DPG, yang termasuk pada kader .. Kebanyakan informasi yang tidak didapatkan oleh kader . hal ini menjadikan diskomunikasi kurang baik antara kader . dan para pengurus. Ditambah lagi keterlambatan dalam menerima informasi dari ditingkat DPP Partai Sira, yang kemudian mengakibatkan informas

tidak dapat diterima tepat waktu (keterlambatan informasi) dan ini mengakibatkan informasi ini tidak mampu diikuti karena keterbatasan waktu yang diberikan.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Komunikasi Politik Partai Sira Dalam Menyampaikan Pesan Politik Pada Kader . Partai Studi Di Dpw Partai Sira Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Komunikasi Politik Partai Sira Dalam Penguatan Ketidak Siapan Kader Partai?
2. Hambatan Apa Saja Yang Menyebabkan Komunikasi Politik Partai Dalam Penguatan Ketidak Siapan Kader Partai Belum Optimal?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latarbelakang rumusan masalah di atas, maka yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah:

1. Komunikasi Politik DPW Partai Sira Dalam Penguatan Ketidak Siapan Kader Partai
2. Hambatan Apa Saja Yang Menyebabkan Komunikasi Partai DPW Partai Sira Dalam Penguatan Ketidak Siapan Kader Partai Belum Optimal

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang pola komunikasi politik, penelitian ini juga diharapkan berguna dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

- 1) Akademis, sebagai referensi tambahan dalam mengkaji tentang ilmu komunikasi usaha komunikasi pesan politik.
- 2) Peneliti, untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan serta sebagai masukan dalam menyusun karya ilmiah.